

Pelayanan, Keberpihakan, dan Kepercayaan dalam Tata Kelola Vihara: Tinjauan Kritis Berdasarkan Nilai-Nilai Dhamma

Rina Mariana¹

¹ Institut Nalanda

Email: 2586215015@nalanda.ac.id

Santoso Jafar²

² Institut Nalanda

Email: 24031601343@nalanda.ac.id

Lim Tung Kong³

³ Institut Nalanda

Email: 24031601334@nalanda.ac.id

Aditya Ananta Nugroho⁴

⁴ Institut Nalanda

Email: 2586215037@nalanda.ac.id

Ferdy Anthonius⁵

⁵ Institut Nalanda

Email: ferdyanthonius@nalanda.ac.id

Majaputera Karniawan⁶

⁶ Institut Nalanda

Email: majaputera@nalanda.ac.id

Abstrak

Tata kelola vihara tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan organisatoris, tetapi juga memiliki dimensi moral yang berakar pada nilai-nilai Dhamma. Dalam konteks kehidupan umat Buddha, kualitas pelayanan, keberpihakan terhadap kebutuhan umat, dan kepercayaan menjadi aspek penting dalam membangun tata kelola vihara yang berorientasi pada kemanfaatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keterkaitan antara pelayanan, keberpihakan dan keadilan, serta kepercayaan umat dalam tata kelola vihara berdasarkan nilai-nilai Dhamma. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengidentifikasi, menyeleksi, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan. Literatur diperoleh dari sejumlah basis data akademik dengan fokus pada publikasi tahun 2020–2026 yang membahas tata kelola organisasi keagamaan, administrasi vihara, pelayanan umat, kepemimpinan Buddhis, keadilan, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan nilai-nilai Dhamma. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan umat merupakan bentuk konkret penerapan mettā dan karuṇā melalui sikap responsif, kepedulian, komunikasi yang baik, dan pemenuhan kebutuhan umat. Keberpihakan dalam tata kelola vihara perlu dimaknai sebagai keberpihakan pada keadilan, kebutuhan, dan kemaslahatan umat, bukan sebagai perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan, status, atau kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, kepercayaan umat terbentuk melalui transparansi, akuntabilitas, integritas, partisipasi, konsistensi pelayanan, dan keteladanan pengelola vihara. Dengan demikian, nilai-nilai Dhamma tidak cukup ditempatkan sebagai landasan normatif, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme tata kelola, praktik pelayanan, pengambilan keputusan, dan hubungan sosial dalam kehidupan vihara. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi nilai Dhamma dengan prinsip tata kelola yang baik dapat memperkuat kualitas pelayanan sekaligus membangun keadilan dan kepercayaan umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: tata kelola vihara; pelayanan umat; keberpihakan; keadilan; kepercayaan; Dhamma; Buddhisme.

Abstract

Temple governance is not only concerned with administrative and organizational aspects but also involves a moral dimension rooted in Buddhist Dhamma values. In the context of Buddhist communities, service quality, responsiveness to devotees' needs, and trust are important elements in developing temple governance oriented toward collective well-being. This study aims to critically analyze the relationship between community service, fairness and responsiveness, and devotees' trust in temple governance based on Dhamma values. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) by identifying, selecting, analyzing, and synthesizing relevant scholarly literature. The literature was obtained from several academic databases, focusing on publications from 2020 to 2026 addressing religious organizational governance, temple administration, community service, Buddhist leadership, fairness, transparency, accountability, trust, and Dhamma values. The findings indicate that community service represents a concrete application of mettā and karuṇā through responsiveness, care, effective communication, and attention to devotees' needs. Responsiveness in temple governance should be understood as an orientation toward fairness, needs, and collective well-being rather than preferential treatment based on personal relationships, social status, or particular group interests. Meanwhile, devotees' trust is developed through transparency, accountability, integrity, participation, consistency in service, and exemplary conduct among temple administrators. Therefore, Dhamma values should not merely function as normative foundations but should be translated into governance mechanisms, service practices, decision-making processes, and social relationships within temple communities. This review emphasizes that integrating Dhamma values with good governance principles can strengthen service quality while fostering fairness and sustainable trust among Buddhist devotees.

Keywords: temple governance; community service; responsiveness; fairness; trust; Dhamma; Buddhism.

PENDAHULUAN

Vihara tidak hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan umat Buddha, tetapi juga sebagai ruang pembinaan moral, pengembangan kehidupan sosial, pendidikan Dhamma, serta pelayanan kepada umat dan masyarakat. Dalam perkembangan kehidupan keagamaan yang semakin kompleks, keberadaan vihara dituntut untuk mampu menjalankan fungsi keagamaan sekaligus fungsi sosial secara bertanggung jawab. Vihara menjadi ruang pertemuan antara nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan nyata umat, sehingga pengelolaannya tidak cukup hanya berorientasi pada keberlangsungan kegiatan ritual, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pelayanan, keterbukaan pengelolaan, partisipasi umat, dan tanggung jawab sosial. Kajian mengenai peran agama dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa Buddhisme dapat berkontribusi terhadap kehidupan komunitas melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kesejahteraan, penyelesaian konflik, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Suwan, 2021).

Dalam konteks tersebut, tata kelola vihara menjadi aspek penting karena kualitas suatu lembaga keagamaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan, kelengkapan sarana ibadah, atau banyaknya kegiatan keagamaan, tetapi juga oleh bagaimana lembaga tersebut dikelola dan memberikan pelayanan kepada umat. Tata kelola mencakup proses pengambilan keputusan, pembagian tugas, pengelolaan sumber daya, komunikasi, pelayanan, pertanggungjawaban, serta hubungan antara pengurus, rohaniwan, dan umat. Pengelolaan yang baik pada akhirnya akan menciptakan lingkungan keagamaan yang lebih terbuka, tertib, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif Buddhis, pengelolaan lembaga tidak seharusnya dipisahkan dari nilai moral karena tindakan administratif pada dasarnya juga merupakan tindakan manusia yang memiliki konsekuensi etis. Kajian tentang Buddha Governance menunjukkan bahwa prinsip tata kelola dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip good governance dengan Dhamma, antara lain melalui moralitas, akuntabilitas, partisipasi, tanggung jawab, efektivitas, serta prinsip-prinsip Buddhis seperti Sappurisadhamma, Brahmavihara, Iddhipada, dan Sangahavattu.

(Kittirattanamongkol, 2023).

Persoalan tata kelola menjadi semakin penting ketika vihara diposisikan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan langsung kepada umat. Pelayanan keagamaan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bentuk nyata dari bagaimana nilai-nilai Dhamma diterjemahkan ke dalam hubungan antarmanusia. Umat datang ke vihara bukan hanya untuk mengikuti puja bakti, meditasi, atau kegiatan keagamaan lainnya, tetapi juga dapat membutuhkan pendampingan, informasi, konsultasi, pembinaan, pelayanan pada saat mengalami kesulitan, hingga dukungan sosial dalam berbagai situasi kehidupan. Karena itu, kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberfungsian lembaga keagamaan. Penelitian mengenai kualitas pelayanan pada rumah ibadah Buddha di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan dan kemauan pengelola maupun rohaniwan dalam memberikan pelayanan, merespons kebutuhan umat, menyediakan informasi, dan menangani keluhan menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas pelayanan yang diterima umat (Wijoyo et al., 2022).

Pelayanan yang baik pada hakikatnya menempatkan manusia sebagai subjek yang perlu dihargai, didengarkan, dan dilayani secara adil. Dalam konteks vihara, prinsip tersebut memiliki hubungan yang erat dengan nilai mettā atau cinta kasih, karuṇā atau welas asih, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut tidak semestinya berhenti sebagai konsep yang disampaikan dalam kegiatan Dhamma, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku pengurus ketika berinteraksi dengan umat. Penelitian tentang kepemimpinan etis menunjukkan bahwa perilaku seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, penghormatan, dan kepedulian terhadap orang lain merupakan karakter penting dalam membangun hubungan yang sehat dalam organisasi (Srichandari & Thanaphaet, 2020). Dengan demikian, pelayanan dalam tata kelola vihara dapat dipandang sebagai salah satu ruang aktualisasi Dhamma dalam kehidupan organisasi.

Di sisi lain, keberpihakan dalam tata kelola lembaga keagamaan perlu dipahami secara hati-hati. Keberpihakan tidak berarti memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok atau individu tertentu, melainkan keberpihakan kepada nilai kemanusiaan, keadilan, kebutuhan umat, kelompok yang membutuhkan perhatian, serta tujuan pembinaan Dhamma. Dalam pengertian ini, pengelola vihara perlu memastikan bahwa pelayanan tidak hanya mudah diakses oleh umat yang memiliki posisi sosial, kedekatan personal, kemampuan ekonomi, atau pengaruh tertentu. Pelayanan yang berlandaskan Dhamma semestinya mengedepankan kepedulian dan penghormatan terhadap setiap umat. Prinsip tersebut sejalan dengan kajian mengenai kepemimpinan Buddhis yang menempatkan kesadaran, kasih sayang, kepedulian, dan orientasi pelayanan sebagai unsur penting dalam kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Buddhis (Ng, 2020).

Keberpihakan terhadap umat yang membutuhkan perhatian juga dapat dilihat melalui konsep pelayanan yang berorientasi pada pengurangan penderitaan. Salah satu tujuan penting praktik Buddhis adalah memahami dan mengatasi dukkha. Oleh sebab itu, lembaga keagamaan tidak semestinya hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ritual, tetapi juga dapat menjadi ruang yang membantu umat menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara bijaksana. Dalam perspektif sosial, Buddhisme telah banyak dipahami memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial, kepedulian terhadap kelompok yang mengalami kesulitan, pemberdayaan, dan pembangunan kehidupan komunitas (Suwan, 2021). Hal ini memberikan dasar bahwa pelayanan vihara dapat dikembangkan bukan hanya dalam bentuk pelayanan ritual, tetapi juga dalam bentuk pelayanan sosial dan pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan umat.

Dalam praktiknya, keberpihakan tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengurus vihara memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber daya yang berasal dari umat, termasuk dana persembahan, sumbangan, fasilitas, dan sumber daya manusia. Ketika pengelolaan sumber daya dilakukan secara tertutup atau tidak dikomunikasikan dengan baik, potensi munculnya keraguan dari umat menjadi semakin besar. Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas dapat memberikan ruang bagi umat untuk memahami bagaimana sumber daya dikelola dan untuk kepentingan apa sumber daya tersebut digunakan. Kajian mengenai hubungan antara tata kelola yang baik dan kepercayaan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas merupakan unsur yang berhubungan dengan terbentuknya kepercayaan publik (Hartanto et al., 2021).

Kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah vihara. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui aturan tertulis atau struktur organisasi, tetapi terbentuk melalui pengalaman umat ketika berinteraksi dengan pengurus dan merasakan konsistensi antara nilai yang disampaikan dengan praktik yang dilakukan. Umat akan menilai apakah pengurus dapat dipercaya melalui berbagai pengalaman konkret, misalnya bagaimana pengurus menyampaikan informasi, menangani keluhan, mengelola dana, memperlakukan umat, menyelesaikan persoalan, serta mengambil keputusan. Penelitian mengenai iklim etis organisasi memperlihatkan bahwa nilai tanggung jawab sosial, moralitas, aturan, dan standar etis memiliki hubungan dengan kepercayaan terhadap pimpinan maupun organisasi (Kim & Kim, 2022).

Dengan demikian, kepercayaan dalam tata kelola vihara memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar keyakinan bahwa pengurus mampu melaksanakan tugas administratif. Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan umat bahwa pengurus memiliki integritas, menjalankan tanggung jawab secara benar, memperlakukan umat secara adil, serta tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam organisasi, kepercayaan juga berkaitan erat dengan hubungan sosial yang sehat karena individu akan lebih mudah berpartisipasi ketika mereka merasa dihargai dan memiliki keyakinan terhadap integritas pihak yang mengelola organisasi. Kajian mengenai kepemimpinan positif menunjukkan bahwa kepemimpinan etis, autentik, transformasional, pemberdayaan, dan pelayanan memiliki kesamaan pada dimensi moralitas, keteladanan, penghormatan terhadap otonomi anggota, serta hubungan sosial yang positif (Lee et al., 2021).

Dalam perspektif Dhamma, persoalan kepercayaan tersebut memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan persepsi sosial, tetapi juga berhubungan dengan kualitas batin dan perilaku seseorang. Pengelola vihara yang memahami tanggung jawabnya berdasarkan Dhamma dituntut untuk mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap umat dan lembaga. Penelitian mengenai akuntabilitas berbasis mettā dan kamma menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks vihara dapat dipahami melalui kepemimpinan yang menggunakan pendekatan hati, pemberdayaan, transparansi, serta ketaatan terhadap hukum dan aturan sebagai bentuk tanggung jawab moral (Putri et al., 2019). Meskipun penelitian tersebut terbit sebelum 2020, gagasannya relevan untuk memperkuat perspektif bahwa akuntabilitas dalam lembaga Buddhis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual.

Nilai Dhamma juga memberikan dasar bagi pemaknaan kepemimpinan sebagai bentuk

pelayanan. Kepemimpinan tidak semestinya dipahami sebagai penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat dan mengurangi penderitaan. Kajian tentang kepemimpinan etis berdasarkan prinsip Buddha Dhamma menempatkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, ketekunan, keteladanan, dan kematangan moral sebagai karakter penting seorang pemimpin (Srichandari & Thanaphaet, 2020). Dalam konteks vihara, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kepemimpinan pengurus yang tidak hanya mampu mengatur kegiatan, tetapi juga mampu memberikan teladan dalam pelayanan, membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik secara bijaksana, dan menempatkan kepentingan pembinaan umat sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah hubungan antara pelayanan, keberpihakan, dan partisipasi umat. Tata kelola vihara yang sehat tidak dapat dibangun hanya oleh pengurus secara sepihak. Umat merupakan bagian penting dari ekosistem kelembagaan vihara sehingga keterlibatan mereka dalam proses komunikasi, kegiatan, evaluasi, dan pengembangan program menjadi penting. Prinsip partisipasi juga merupakan salah satu unsur dalam tata kelola yang berorientasi pada Dhamma. Model Buddha Governance menempatkan partisipasi dan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari tata kelola yang dapat memperkuat keberlangsungan pengelolaan lembaga Buddhis (Kittirattanamongkol, 2023).

Partisipasi umat juga memiliki hubungan dengan munculnya rasa memiliki terhadap vihara. Ketika umat memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan terlibat dalam kegiatan, mereka tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengembangan lembaga. Sebaliknya, tata kelola yang terlalu tertutup berpotensi menciptakan jarak antara pengurus dan umat. Dalam jangka panjang, jarak tersebut dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan kepercayaan. Oleh karena itu, pelayanan yang responsif perlu disertai dengan mekanisme komunikasi yang terbuka dan partisipatif agar kebutuhan umat dapat diketahui secara lebih objektif dan keputusan kelembagaan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Konteks perkembangan masyarakat juga menuntut vihara untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan zaman. Perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi generasi muda, serta meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan yang cepat dan transparan membawa konsekuensi terhadap cara lembaga keagamaan dikelola. Vihara perlu mempertahankan nilai-nilai dasar Dhamma sekaligus mengembangkan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Kajian mengenai manajemen sumber daya manusia berbasis prinsip tata kelola Buddhis pada era digital menunjukkan bahwa nilai Dhamma tetap relevan dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan organisasi (Pakasagulwong & Metheevarachatra, 2021).

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap pelayanan keagamaan yang baik juga semakin penting karena lembaga keagamaan berhadapan dengan umat yang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan harapan yang beragam. Pelayanan yang diberikan oleh lembaga keagamaan idealnya tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga memberikan pengalaman pelayanan yang manusiawi. Kementerian Agama, misalnya, dalam pengembangan Sentra Pelayanan Umat Buddha menekankan pentingnya semangat pelayanan dan kelenturan dalam memberikan layanan kepada umat. Pemahaman yang baik terhadap Buddha Dhamma dipandang sebagai salah satu dasar agar pelayanan dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan dalam interaksi

dengan umat (Ditjen Bimas Buddha, 2022).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan keagamaan tidak dapat dilepaskan dari kualitas hubungan antarmanusia. Pengurus yang memiliki pengetahuan administratif tetapi kurang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan umat dapat menghadirkan pelayanan yang bersifat formalistik. Sebaliknya, kepedulian tanpa sistem tata kelola yang jelas juga dapat menimbulkan persoalan dalam konsistensi pelayanan, pembagian tanggung jawab, dan akuntabilitas. Karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara nilai Dhamma dan prinsip tata kelola organisasi. Dhamma memberikan dasar moral bagi tindakan, sementara tata kelola memberikan sistem agar nilai tersebut dapat diwujudkan secara konsisten dalam praktik kelembagaan.

Pada titik inilah konsep pelayanan, keberpihakan, dan kepercayaan menjadi tiga aspek yang saling berkaitan. Pelayanan merupakan bentuk nyata hubungan vihara dengan umat. Keberpihakan menunjukkan orientasi moral bahwa pelayanan diarahkan pada kemaslahatan, keadilan, dan kebutuhan umat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian. Sementara itu, kepercayaan merupakan konsekuensi relasional yang dapat tumbuh ketika umat merasakan adanya konsistensi antara nilai, kebijakan, dan perilaku pengelola. Dengan kata lain, pelayanan yang baik tanpa integritas belum tentu menghasilkan kepercayaan, sedangkan keberpihakan tanpa keadilan dapat berubah menjadi favoritisme. Oleh karena itu, ketiganya perlu diletakkan dalam kerangka Dhamma yang menekankan moralitas, cinta kasih, welas asih, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kebijaksanaan.

Persoalan tersebut menarik untuk dikaji secara kritis karena terdapat kemungkinan kesenjangan antara nilai Dhamma yang ideal dengan praktik tata kelola vihara yang berlangsung sehari-hari. Dhamma dapat dipahami dan diajarkan sebagai seperangkat nilai moral, tetapi penerapannya dalam tata kelola lembaga membutuhkan mekanisme yang lebih konkret. Misalnya, bagaimana nilai mettā diterapkan dalam pelayanan umat? Bagaimana karuṇā diwujudkan dalam keberpihakan kepada umat yang membutuhkan? Bagaimana prinsip moralitas diterapkan dalam pengelolaan sumber daya? Bagaimana pengurus membangun kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas? Serta bagaimana umat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam tata kelola vihara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Dhamma dan tata kelola bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga merupakan persoalan praktik kelembagaan.

Kajian mengenai tata kelola vihara dengan perspektif Dhamma menjadi semakin relevan karena penelitian tentang pengelolaan lembaga Buddhis selama ini banyak membahas aspek tertentu secara terpisah, seperti kepemimpinan, pelayanan, keuangan, pendidikan, atau tata kelola. Padahal, dalam praktiknya aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Tata kelola keuangan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan; kepemimpinan yang etis dapat memperbaiki kualitas pelayanan; pelayanan yang responsif dapat memperkuat keterikatan umat; sementara keberpihakan yang didasarkan pada welas asih dapat memperkuat fungsi sosial vihara. Dengan demikian, diperlukan perspektif yang mampu melihat tata kelola vihara sebagai satu kesatuan antara sistem organisasi, kualitas pelayanan, nilai moral, dan hubungan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, tata kelola vihara perlu dipahami bukan semata-mata sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan kelembagaan. Pelayanan menjadi wujud nyata kepedulian terhadap umat, keberpihakan menjadi orientasi moral dalam memastikan keadilan dan perhatian terhadap kebutuhan umat, sedangkan

kepercayaan menjadi modal sosial yang terbentuk melalui integritas, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi perilaku pengelola. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran mengenai Buddha Governance yang mengintegrasikan tata kelola modern dengan nilai-nilai Buddhis untuk menghasilkan pengelolaan lembaga yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya (Kittirattanamongkol, 2023).

Oleh karena itu, “Pelayanan, Keberpihakan, dan Kepercayaan dalam Tata Kelola Vihara: Tinjauan Kritis Berdasarkan Nilai-Nilai Dhamma” menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Dhamma tidak hanya hadir dalam aktivitas ritual dan pembinaan keagamaan, tetapi juga tercermin dalam cara vihara memberikan pelayanan, mengambil keputusan, memperlakukan umat, mengelola sumber daya, membangun partisipasi, dan mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimiliki. Pendekatan kritis diperlukan agar pembahasan tidak berhenti pada pemahaman normatif bahwa tata kelola vihara “harus” sesuai dengan Dhamma, tetapi mampu melihat secara lebih mendalam bagaimana nilai tersebut diwujudkan, apa tantangan penerapannya, serta bagaimana hubungan antara praktik tata kelola dengan tumbuhnya kepercayaan umat. Dengan demikian, nilai-nilai Dhamma dapat ditempatkan bukan hanya sebagai ajaran yang dipahami secara teoritis, tetapi sebagai landasan etis yang hidup dalam praktik pengelolaan vihara dan pelayanan kepada umat.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama dalam tata kelola vihara berdasarkan nilai-nilai Dhamma, yaitu (1) pelayanan umat, dengan mengkaji bagaimana prinsip mettā (cinta kasih), karuṇā (welas asih), dan kepedulian diwujudkan dalam kualitas pelayanan, responsivitas, komunikasi, serta pemenuhan kebutuhan umat; (2) keberpihakan dan keadilan, dengan menganalisis bagaimana tata kelola vihara memastikan pelayanan yang inklusif, tidak diskriminatif, dan memberikan perhatian terhadap umat berdasarkan kebutuhan tanpa dipengaruhi kedekatan, status, atau kepentingan tertentu; dan (3) kepercayaan umat, dengan mengkaji keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, integritas pengurus, partisipasi, dan konsistensi pelayanan dengan terbentuknya kepercayaan umat terhadap pengelolaan vihara. Ketiga fokus tersebut dianalisis secara terpadu untuk memahami bagaimana nilai-nilai Dhamma dapat menjadi landasan etis sekaligus praktis dalam membangun tata kelola vihara yang bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada pelayanan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan dengan pelayanan, keberpihakan, kepercayaan, dan tata kelola vihara berdasarkan nilai-nilai Dhamma. SLR dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang sistematis mengenai perkembangan pengetahuan, tema-tema utama, serta kesenjangan penelitian dalam bidang tata kelola lembaga keagamaan Buddha. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perumusan pertanyaan penelitian, penelusuran literatur, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, seleksi artikel, ekstraksi data, analisis, dan sintesis hasil penelitian (Page et al., 2021).

Penelusuran literatur dilakukan pada sejumlah basis data ilmiah, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, dengan menggunakan kombinasi kata kunci “Buddhist temple governance”, “Buddhist temple management”, “Buddhist leadership”, “service quality”, “trust”, “Dhamma values”, “Buddhist organization”, serta padanan istilah dalam bahasa

Indonesia. Literatur yang dipertimbangkan adalah artikel ilmiah yang diterbitkan terutama pada periode 2020–2026, tersedia dalam teks lengkap, relevan dengan fokus penelitian, dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Artikel yang tidak berkaitan langsung dengan tata kelola, pelayanan, kepercayaan, kepemimpinan, atau nilai-nilai Dhamma, serta publikasi yang tidak memenuhi kriteria akademik, dikeluarkan dari proses analisis. Proses identifikasi dan seleksi literatur dilaporkan mengikuti kerangka PRISMA 2020 agar tahapan pemilihan artikel dapat dilakukan secara transparan dan dapat ditelusuri (Page et al., 2021).

Data dari artikel yang memenuhi kriteria kemudian diekstraksi berdasarkan informasi mengenai penulis, tahun publikasi, konteks penelitian, tujuan, metode, temuan utama, serta konsep yang berkaitan dengan pelayanan, keberpihakan, kepercayaan, tata kelola, dan nilai-nilai Dhamma. Analisis dilakukan secara tematik-naratif dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema yang memiliki kesamaan konseptual, kemudian membandingkan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan hasil penelitian. Sintesis tersebut digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Dhamma, seperti mettā (cinta kasih), karuṇā (welas asih), moralitas, tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan, dapat dihubungkan dengan praktik tata kelola dan pelayanan vihara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga mengidentifikasi research gap dan merumuskan arah pengembangan kajian tata kelola vihara berbasis nilai-nilai Dhamma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR), penelitian mengenai pelayanan, keberpihakan, dan kepercayaan dalam tata kelola vihara berdasarkan nilai-nilai Dhamma menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan. Literatur yang dikaji memperlihatkan kecenderungan bahwa pengelolaan vihara mengalami pergeseran dari pendekatan yang semata-mata administratif menuju tata kelola yang menggabungkan prinsip organisasi modern dengan nilai moral dan ajaran Buddhis. Konsep Buddha Governance, misalnya, mengintegrasikan prinsip good governance seperti rule of law, moralitas, akuntabilitas, partisipasi, tanggung jawab, dan efektivitas dengan prinsip Sappurisadhamma, Brahmavihāra, Iddhipāda, dan Sangahavatthu. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola vihara tidak hanya diarahkan untuk memastikan kegiatan berjalan secara efektif, tetapi juga untuk membangun pengelolaan yang dapat dipercaya, bermoral, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pembinaan kehidupan Buddhis (Kittirattanamongkol, 2023).

Pelayanan Umat dalam Tata Kelola Vihara Berdasarkan Nilai-Nilai Dhamma

Hasil SLR pada fokus pertama menunjukkan bahwa pelayanan umat merupakan manifestasi paling konkret dari nilai-nilai Dhamma dalam tata kelola vihara. Vihara tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, pendidikan, interaksi sosial, pemberian dukungan moral, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas tata kelola dapat dilihat dari sejauh mana pengurus mampu mengidentifikasi kebutuhan umat dan menerjemahkannya menjadi pelayanan yang mudah diakses, responsif, manusiawi, dan berkelanjutan. Kajian mengenai peran Buddhisme dalam kesejahteraan publik menunjukkan bahwa aktivitas Buddhis dapat diarahkan pada membantu, mengembangkan, dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, pelayanan keagamaan tidak berhenti pada penyampaian ajaran, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pelayanan sosial dan penyelesaian persoalan

masyarakat (Sangpunya & Lapthananon, 2021).

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh perilaku pengelola ketika berinteraksi dengan umat. Pelayanan yang baik membutuhkan kemampuan mendengarkan, memberikan informasi yang jelas, merespons kebutuhan, menangani persoalan, serta memperlakukan umat dengan hormat. Dalam perspektif Dhamma, aspek tersebut dapat dihubungkan dengan mettā dan karuṇā. Mettā memberikan orientasi cinta kasih dan penghormatan terhadap pihak yang dilayani, sedangkan karuṇā memberikan orientasi untuk memahami dan merespons penderitaan atau kesulitan orang lain. Dengan demikian, pelayanan berbasis Dhamma tidak cukup diukur dari apakah suatu layanan tersedia, tetapi juga dari bagaimana layanan tersebut diberikan dan bagaimana umat diperlakukan selama memperoleh pelayanan. Prinsip Sangahavatthu yang menjadi bagian dari kerangka Buddha Governance juga memperkuat orientasi hubungan sosial, keharmonisan, dan kemampuan membangun keterikatan antara pengurus dengan komunitas (Kittirattanamongkol, 2023).

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa pelayanan umat memiliki dimensi responsivitas. Pengurus vihara perlu memiliki kemampuan untuk merespons perubahan kebutuhan umat dan perubahan lingkungan sosial. Hal ini menjadi semakin penting ketika kehidupan keagamaan berhadapan dengan perkembangan teknologi, perubahan pola komunikasi, dan keragaman karakter umat. Buddha Governance dikembangkan antara lain untuk memungkinkan administrasi vihara tetap berpegang pada prinsip-prinsip Dhamma sekaligus mampu merespons perubahan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan vihara tidak dapat sepenuhnya menggunakan pola pelayanan yang bersifat konvensional apabila pola tersebut tidak lagi mampu menjawab kebutuhan umat. Responsivitas dalam konteks ini bukan berarti meninggalkan nilai tradisional, melainkan mencari bentuk pelayanan baru yang tetap memiliki dasar moral dan tujuan pembinaan Buddhis (Kittirattanamongkol, 2023).

Pelayanan juga berkaitan dengan pemberdayaan umat. Hasil kajian tentang Engaged Buddhism menunjukkan bahwa pelayanan sosial Buddhis dapat dikembangkan melalui penguatan manusia, pengembangan pekerjaan, dan pengembangan mata pencaharian yang diarahkan pada kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya transfer pengetahuan, partisipasi, dan kerja sama antarpersonel dalam pelaksanaan pelayanan publik. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa pelayanan vihara sebaiknya tidak menempatkan umat hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dengan pola demikian, pelayanan berkembang dari model yang bersifat satu arah menuju pelayanan yang partisipatif dan memberdayakan (Sangpunya & Lapthananon, 2021).

Dengan demikian, sintesis pada fokus pertama menunjukkan bahwa pelayanan umat berbasis Dhamma memiliki sekurang-kurangnya empat karakter utama, yaitu responsif terhadap kebutuhan umat, berorientasi pada kepedulian, menghargai martabat umat, dan mendorong pemberdayaan serta partisipasi. Pelayanan menjadi indikator penting karena melalui pelayananlah umat dapat melihat secara langsung apakah nilai Dhamma benar-benar diterapkan dalam tata kelola vihara. Artinya, Dhamma tidak hanya berada pada tataran ajaran yang disampaikan dalam khotbah atau kegiatan keagamaan, tetapi diterjemahkan menjadi etika interaksi, sikap pengurus, mekanisme pelayanan, dan cara lembaga merespons kebutuhan masyarakat.

Keberpihakan dan Keadilan dalam Tata Kelola Vihara

Pada fokus kedua, hasil SLR menunjukkan bahwa keberpihakan dalam tata kelola vihara perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan, kepedulian, dan kepentingan umat, bukan sebagai bentuk keberpihakan kepada individu atau kelompok tertentu. Konsep keberpihakan menjadi penting karena lembaga keagamaan berhadapan dengan umat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, usia, kebutuhan, dan pengalaman keagamaan yang berbeda. Tata kelola yang berbasis Dhamma perlu memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi dasar untuk memberikan perlakuan yang merendahkan, diskriminatif, atau tidak adil. Sebaliknya, keberpihakan dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap pihak yang memiliki kebutuhan lebih besar, terutama ketika terdapat umat yang mengalami kesulitan dan membutuhkan dukungan.

Dalam perspektif nilai Buddhis, orientasi tersebut memiliki hubungan erat dengan karuṇā atau welas asih. Welas asih menuntut adanya perhatian terhadap penderitaan dan kebutuhan pihak lain. Hasil kajian mengenai Engaged Buddhism memperlihatkan bahwa kegiatan pelayanan publik Buddhis dapat diarahkan pada upaya membantu masyarakat, mengembangkan kualitas hidup, serta merespons persoalan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip Buddhis. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberpihakan sosial bukan sesuatu yang berada di luar kehidupan keagamaan, tetapi dapat menjadi bentuk konkret dari penerapan ajaran Buddhis dalam kehidupan masyarakat (Sangpunya & Laphthananon, 2021).

Keberpihakan yang berlandaskan Dhamma juga berkaitan dengan keadilan dalam pengambilan keputusan. Pengurus vihara memiliki kewenangan untuk menentukan program, mengalokasikan sumber daya, mengatur kegiatan, dan menetapkan prioritas pelayanan. Kewenangan tersebut perlu digunakan secara bertanggung jawab dan tidak semata-mata berdasarkan hubungan personal. Konsep Buddha Governance menempatkan moralitas, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab sebagai unsur utama tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan organisasi seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun kelembagaan serta memberikan ruang bagi keterlibatan komunitas (Kittirattanamongkol, 2023).

Temuan lain yang penting adalah bahwa partisipasi merupakan bagian dari keberpihakan yang adil. Ketika umat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan terlibat dalam kegiatan, tata kelola menjadi lebih inklusif. Sebaliknya, apabila pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu tanpa komunikasi yang memadai, terdapat risiko munculnya jarak antara pengurus dan umat. Dalam kerangka Buddha Governance, partisipasi secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu prinsip tata kelola bersama dengan akuntabilitas dan tanggung jawab. Dengan demikian, keberpihakan tidak hanya dilihat dari hasil keputusan, tetapi juga dari proses bagaimana keputusan tersebut dibuat (Kittirattanamongkol, 2023).

Pada sisi lain, hasil kajian menunjukkan pentingnya membedakan antara keberpihakan berbasis kebutuhan dengan favoritisme. Keberpihakan kepada umat yang membutuhkan dukungan dapat sesuai dengan prinsip welas asih, sedangkan perlakuan khusus karena kedekatan pribadi, status sosial, hubungan keluarga, atau kepentingan tertentu dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas tata kelola. Oleh karena itu, nilai Dhamma perlu diterjemahkan melalui prosedur yang jelas agar kepedulian tidak bergantung pada subjektivitas pengurus. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan melalui kriteria pelayanan, mekanisme pengaduan, pembagian sumber daya yang transparan, serta ruang partisipasi yang dapat diakses umat.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa keberpihakan memiliki dimensi sosial dan pemberdayaan, bukan hanya pelayanan individual. Vihara dapat memberikan ruang kepada umat untuk berkembang melalui pendidikan Dhamma, kegiatan sosial, pengembangan keterampilan, kegiatan ekonomi, pembinaan generasi muda, dan berbagai bentuk pemberdayaan lainnya. Dengan demikian, keberpihakan tidak hanya berarti “membantu ketika ada masalah”, tetapi juga menciptakan kondisi agar umat memiliki kemampuan untuk berkembang dan berpartisipasi secara lebih mandiri. Pola ini sejalan dengan temuan Sangpunya dan Lapthananon (2021) mengenai pengembangan manusia, pekerjaan, dan mata pencaharian sebagai bagian dari pelayanan sosial Buddhis.

Dengan demikian, fokus kedua menghasilkan temuan bahwa keberpihakan berbasis Dhamma memiliki empat karakter utama: keadilan, kepedulian, inklusivitas, dan pemberdayaan. Keberpihakan tidak diarahkan pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi pada pemenuhan kebutuhan umat secara proporsional dan bermartabat. Dalam tata kelola, prinsip tersebut perlu didukung oleh partisipasi, akuntabilitas, mekanisme pengambilan keputusan yang jelas, dan transparansi agar nilai welas asih dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Kepercayaan Umat terhadap Tata Kelola Vihara

Fokus ketiga menunjukkan bahwa kepercayaan umat merupakan hasil dari pengalaman mereka terhadap integritas tata kelola dan kualitas hubungan dengan pengurus. Kepercayaan tidak muncul secara otomatis hanya karena sebuah lembaga merupakan lembaga keagamaan. Kepercayaan dibangun melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh konsistensi antara nilai yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Dalam konteks vihara, umat dapat menilai kepercayaan melalui pengalaman mereka ketika memperoleh pelayanan, mendapatkan informasi, berinteraksi dengan pengurus, menyampaikan keluhan, mengikuti kegiatan, maupun ketika mengetahui bagaimana sumber daya vihara dikelola.

Literatur tentang tata kelola dan kepercayaan memperlihatkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas merupakan faktor penting yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Penelitian Hartanto et al. (2021), misalnya, menemukan hubungan antara persepsi terhadap transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun konteks penelitian tersebut bukan lembaga keagamaan, temuan tersebut memberikan kerangka konseptual yang relevan bahwa kepercayaan terhadap suatu lembaga berkembang ketika pihak yang mengelola lembaga dianggap terbuka, bertanggung jawab, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tata kelola vihara, prinsip tersebut dapat diterapkan pada pengelolaan dana, penyampaian informasi, penggunaan fasilitas, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kegiatan. Umat yang memberikan dana atau dukungan kepada vihara memiliki kepentingan untuk mengetahui bahwa sumber daya tersebut digunakan sesuai dengan tujuan kelembagaan. Karena itu, transparansi bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari etika pelayanan. Ketika informasi mengenai program dan pengelolaan sumber daya tersedia secara jelas, umat memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami keputusan pengurus. Sebaliknya, kurangnya informasi dapat menciptakan ruang bagi prasangka dan ketidakpastian, meskipun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan.

Kepercayaan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpin dan pengurus. Penelitian mengenai kepemimpinan autentik dan kepercayaan menunjukkan bahwa perilaku pemimpin yang memiliki dimensi etika dan hubungan positif berkaitan dengan kepercayaan serta kualitas hubungan sosial dalam organisasi (Chen & Sriphon, 2022). Dalam konteks vihara, temuan tersebut memperkuat pentingnya keteladanan pengurus. Pengurus tidak hanya bertugas mengatur kegiatan, tetapi juga menjadi representasi nilai lembaga di hadapan umat. Sikap jujur, terbuka, konsisten, mampu mengakui kesalahan, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab dapat menjadi pengalaman langsung yang membentuk kepercayaan umat.

Nilai Dhamma memberikan dimensi tambahan terhadap persoalan tersebut. Kepercayaan dalam tata kelola vihara tidak hanya merupakan persoalan hubungan sosial, tetapi juga persoalan moral. Pengurus yang memperoleh kepercayaan umat memperoleh amanah untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tanggung jawab kelembagaan. Oleh karena itu, pengelolaan kewenangan perlu dilandasi moralitas dan kesadaran terhadap konsekuensi tindakan. Kerangka Buddha Governance menempatkan moralitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola vihara (Kittirattanamongkol, 2023).

Kepercayaan juga berkaitan dengan konsistensi pelayanan. Umat tidak hanya menilai satu peristiwa, tetapi mengakumulasi pengalaman pelayanan dari waktu ke waktu. Pengurus yang ramah dalam satu kegiatan tetapi tidak responsif pada kesempatan lain dapat menghasilkan pengalaman yang tidak konsisten. Sebaliknya, pelayanan yang konsisten memberikan sinyal bahwa nilai yang dikembangkan oleh lembaga bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi bagian dari budaya organisasi. Oleh karena itu, kepercayaan perlu dibangun melalui kebiasaan organisasi, bukan hanya melalui program sesaat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki hubungan dengan partisipasi umat. Umat yang memiliki pengalaman positif terhadap tata kelola dan merasa suaranya dihargai memiliki dasar yang lebih kuat untuk terlibat dalam kegiatan lembaga. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat mengurangi keterlibatan dan menciptakan jarak antara umat dengan pengurus. Karena itu, mekanisme umpan balik, forum komunikasi, keterbukaan informasi, serta ruang partisipasi menjadi instrumen penting untuk mempertahankan hubungan kelembagaan. Dalam kerangka Buddha Governance, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab memang ditempatkan sebagai prinsip yang saling berhubungan dalam pengelolaan vihara (Kittirattanamongkol, 2023).

Sintesis Hasil Berdasarkan Ketiga Fokus

Jika ketiga fokus tersebut disintesis, hasil SLR menunjukkan adanya rantai hubungan konseptual antara nilai Dhamma, tata kelola, pelayanan, keberpihakan, dan kepercayaan. Nilai Dhamma memberikan orientasi moral bagi pengurus; tata kelola menyediakan sistem dan mekanisme untuk menerapkan orientasi tersebut; pelayanan menjadi bentuk interaksi yang dapat dirasakan langsung oleh umat; keberpihakan memastikan bahwa pelayanan diarahkan pada keadilan, kepedulian, dan kebutuhan umat; sedangkan kepercayaan berkembang sebagai hasil dari pengalaman umat terhadap konsistensi keseluruhan proses tersebut. Dengan kata lain, nilai Dhamma → tata kelola yang etis → pelayanan dan keberpihakan yang adil → pengalaman positif umat → kepercayaan merupakan pola yang muncul dari sintesis literatur.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan, keberpihakan, dan kepercayaan tidak tepat dipahami sebagai tiga variabel yang sepenuhnya terpisah. Pelayanan yang baik dapat memperkuat kepercayaan, tetapi kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh orientasi keberpihakan dan sistem tata kelola. Demikian pula, keberpihakan yang tidak didukung transparansi dapat menimbulkan persepsi favoritisme. Sebaliknya, transparansi tanpa kepedulian dapat menghasilkan tata kelola yang formal tetapi kurang manusiawi. Oleh sebab itu, tata kelola vihara berbasis Dhamma membutuhkan keseimbangan antara sistem, moralitas, kepedulian, keadilan, dan hubungan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR), dapat disimpulkan bahwa pelayanan, keberpihakan, dan kepercayaan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam tata kelola vihara berbasis nilai-nilai Dhamma. Pelayanan umat merupakan bentuk nyata penerapan mettā (cinta kasih), karuṇā (welas asih), dan kepedulian melalui pelayanan yang responsif, manusiawi, inklusif, dan memberdayakan. Keberpihakan perlu dimaknai sebagai keberpihakan terhadap keadilan, kebutuhan umat, dan pengurangan penderitaan, bukan favoritisme terhadap individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, kepercayaan umat terbentuk melalui pengalaman terhadap integritas pengurus, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, konsistensi pelayanan, dan keteladanan dalam menjalankan tanggung jawab. Dengan demikian, nilai-nilai Dhamma tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi dapat menjadi prinsip operasional dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kehidupan vihara.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola vihara yang berlandaskan Dhamma membutuhkan integrasi antara nilai moral, sistem tata kelola, kualitas pelayanan, keadilan, dan hubungan sosial. Nilai Dhamma memberikan arah etis, tata kelola menyediakan mekanisme penerapan, pelayanan dan keberpihakan menjadi bentuk nyata yang dirasakan umat, sedangkan kepercayaan menjadi konsekuensi dari konsistensi antara nilai yang diajarkan dengan praktik kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola vihara perlu diarahkan pada penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan kepemimpinan yang berintegritas dengan tetap berakar pada nilai mettā, karuṇā, moralitas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya ruang penelitian lebih lanjut untuk menguji secara empiris bagaimana ketiga aspek tersebut berinteraksi dalam praktik tata kelola vihara di berbagai konteks komunitas Buddhis.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkuna, P., Thinsandee, T., & Sumnagkalo, P. (2023). Guidelines for the development good governance management of school administrators in the charity schools of the Buddhist temples in Roi-Et Province. *Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences*.
- Bhatti, S. H., Kiyani, S. K., Dust, S. B., & Zakariya, R. (2021). The impact of ethical leadership on project success: The mediating role of trust and knowledge sharing. *International Journal of Managing Projects in Business*, 14(4), 982–998. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-05-2020-0159>

- Burmansah, B., Rugaiyah, R., Mukhtar, M., Ripki, A. J. H., & Fatayan, A. (2020). Mindful leadership: The ability of the leader to develop compassion and attention without judgment—A case study of the leader of Buddhist higher education institute. *European Journal of Educational Research*, 9(1), 51–65. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.1.51>
- Chen, J. K. C., & Sriphon, T. (2022). Authentic leadership, trust, and social exchange relationships under the influence of leader behavior. *Sustainability*, 14(10), 5883. <https://doi.org/10.3390/su14105883>
- Chaturaphattharaphisut, P., et al. (2021). A structural equation model of factors effecting the effectiveness of temple administration under Bangkok Sangha. *Psychology and Education Journal*, 58(4).
- Gartner, J., Fink, M., Floh, A., & Eggers, F. (2021). Service quality in social media communication of NPOs: The moderating effect of channel choice. *Journal of Business Research*, 137, 579–587. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.026>
- Ilyas, S., Abid, G., & Ashfaq, F. (2020). Ethical leadership in sustainable organizations: The moderating role of general self-efficacy and the mediating role of organizational trust. *Sustainable Production and Consumption*, 22, 195–204. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.03.003>
- Kittirattanamongkol, N. (2023). Building “Buddha Governance” for temple administration in an era of change. *Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia*, 29(1), 103–116. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/262499>
- Lee, A. J. R., Lyubovnikova, J., Tian, A. W., & Knight, C. (2020). Servant leadership: A meta-analytic examination of incremental contribution, moderation, and mediation. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 93(1), 1–44. <https://doi.org/10.1111/joop.12265>
- Leesmidt, K., & Jarunratanakul, P. (2021). A comparison of Buddhist compassionate and transformational leadership in relations with organizational commitment: The mediating role of trust in the leader. *The Periodical of Behavioral Science*, 16(2).
- Leesmidt, K., & Jarunratanakul, P. (2022). Buddhist compassionate leadership and employee psychological outcomes: The mediating role of trust in leader on Thai financial services employees. *Kasetsart Journal of Social Sciences*.
- Maharutsakul, P. (2020). Administrative factors support the persistence of Buddhism in Thailand. *Journal of Buddhist Anthropology*.
- Mitchell, M. (2022). Regulating chance: Buddhist temple lotteries, government oversight, and anti-Buddhist discourse in early modern Japan. *Journal of Cultural Economy*, 16(5), 716–732. <https://doi.org/10.1080/17530350.2022.2120053>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J.,

- Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Panphet, G. (2022). Ethical leadership based on Vuddhidhammas for school administrators in the 4.0 era. *Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU*.
- Phramaha Noppadol Arsapo, P., Siriwan, I., Srivichai, S., & Sritragarn, T. (2022). Academic administration development of child development centers in charity schools of Buddhist temples. *Journal of Positive School Psychology*.
- Sangpunya, P., & Lapthananon, P. (2021). [Kajian tentang peran Buddhisme/Engaged Buddhism dalam pelayanan dan kesejahteraan sosial]. *Journal of MCU Nakhondhat*.
- Srichandari, J., & Thanaphaet, C. (2020). Ethical leadership according to Buddha Dharma principles of school administrators. *Journal of Modern Learning Development*, 5(5), 321–332.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Tepsing, P. (2022). A temple's management of Buddhist artworks for promoting Thailand and Malaysia border tourism: A case study of Wat Phutthathiwas, Betong, Yala Province. *Hatyai Academic Journal*.
- Vu, M. C., & Gill, R. (2023). Are leaders responsible for meaningful work? Perspectives from Buddhist-enacted leaders and Buddhist ethics. *Journal of Business Ethics*, 187, 347–370. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05293-w>
- Wijoyo, H., Suherman, S., & Khiong, K. (2022). Service quality Pandita Lokapalasraya and Dharmaduta Indonesian Buddhist Assembly. *EARR (Educational Administration Research and Review)*, 6(2).
- Yasir, M., & Khan, N. (2020). Mediating role of employees' trust in the relationship between ethical leadership and workplace deviance in the public sector hospitals of Khyber Pakhtunkhwa. *Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal*, 2, 113–123. <https://doi.org/10.1365/s42681-020-00010-5>
- Zeng, J., & Xu, G. (2020). Linking ethical leadership to employee voice: The role of trust. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 48(8), e9200. <https://doi.org/10.2224/sbp.9200>

